

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPONG DALAM MENGENTASKAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh

**DHIAUL KHALI
NIM: 13134008**

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPONG DALAM MENGENTASKAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH

**DHIAUL KHALI
NIM: 13134008**

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Efi Brata Madya M.Si
NIP. 19670610 199403 1 003

Maulana Andi Surya, MA
NIP. 19750325 200801 1 011

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhiaul Khali

Nim : 13134008

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam
Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh
Singkil

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 23 Oktober 2017
Yang membuat pernyataan

Dhiaul Khali
NIM.13134008

Nomor : Istimewa Medan, 04 April 2019
Lampiran : 6 (Enam) Ekp Kepada Yth:
Hal. : Skripsi Bapak Dekan Fakultas Dakwah
An. Dhiaul Khali dan Komunikasi UIN-SU
Di –
Medan

Assalaamu'aikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa an. Dhiaul Khali yang berjudul : **Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil**. Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya pada sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU Medan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalam.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Efi Brata Madya M.Si
NIP. 19670610 199403 1 003

Maulana Andi Surya, MA
NIP. 19750325 200801 1 011

ABSTRAKSI

Nama : Dhiaul Khali
NIM : 13134008
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong
dalam mengentaskan kemiskinan di Kecatan Singkil
Kabupaten Aceh Singkil
Pembimbing : I. Drs. Efi Brata Madya M.Si
II. Maulana Andi Surya, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan di kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, dengan cara melakukan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di kantor dinas terkait guna untuk mendapatkan data-data yang *real*. Dalam penelitian tersebut peneliti mendapatkan hasil yaitu berupa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong serta bentuk-bentuk dan upaya dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat tersebut.

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan, ada beberapa bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong baik dari pemerintahan desa sampai kepada masyarakat. Dalam pemerintahan kampong dilakukan pemberdayaan dengan sosialisasi cara pengelolaan tata pemerintahan agar lebih baik. Kemudian pemberdayaan kepada masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan potensi masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam di desa tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skrip ini dengan judul “**Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil**” . Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad saw. semoga syafaatnya kita peroleh di yaumul akhir kelak, amin.

Penulis menyadari dengan sesungguhnya, bahwa untuk mewujudkan karya ilmiah itu bukanlah hal yang mudah, akan tetapi dengan kerja keras dan ketekunan yang tinggi serta membutuhkan jangka waktu yang panjang. Penulis menyadari banyak kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki dalam penulisan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya ananda ucapkan kepada tercinta Ayahanda Sudiarmann Manik dan Ibunda Siti Ralijah yang telah banyak memberikam kasih sayangnnya dalam mendidik dan membesarkan ananda hingga mampu menapak diperguruan tinggi serta menyelesaikan pendidikan. Semoga Allah swt. membalas amal kebajikan tersebut dengan berlipat ganda di dunia dan di Akhirat kelak. amin.

Penulis juga ingin mengucapkan terim kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahmanm M. Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara, Medan
2. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan, Drs. Efi Brata Madya, M. Si selaku wakil Dekan I, Drs. Abdurrahman, M. Pd selaku wakil Dekan II, dan Muhammad Husni Ritonga, MA Selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.
3. Bapak H. Muaz Tanjung, MA selaku ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan motivasi, dukungan dan dorongan untuk meyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Salamuddin , MA selaku Sekretaris jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ilhamuddin, MA sebagai pembimbing I, di tengah-tengah kesibukannya beliau sempat berbagi ilmu, memberikan kritik, koreksi, arahan, dan saran yang sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Maulana Andi Surya, MA sebagai pembimbing II, di tengah-tengah kesibukannya beliau sempat berbagi ilmu, memberikan kritik, koreksi, arahan, dan saran yang sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluru Dosen dan staf-staf fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU
8. Pimpinan perpustakaan, Dra. Retno Sayekti, M. Lis, yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan penelitian keperpustakaan.
9. Ayahanda Ilyas Zein (alm) dan Siti Ralijah S. Pd. I selaku orang tua kandung saya yang telah rela berkorban apapun untuk pendidikan kepada anak-anaknya.
10. Abang, kakak, dan adik-adik saya yang selalu memberikan dukunga dan motivasi kepad penulis.
11. Kakak hebat SAPO LPYD dan La Tahzan Community yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan tugas penelitian ini.
12. Sahabat-sahabatku, Silvia Handayani, S. Pd, Mukhlas Al-Abrar, Jeyan Retno, SE, Riska Safrida Nanda Sari dan Niko Pradi Utama S. Ag.
13. Kawan-kawan dijurusan Pengembangan Masyarakat Islam stambuk 2013, Asna, Yuni, Dwi, Wahyu, Susi, Ivan, dan Rahman yang sangat berperan dalam penyelesaian skripsi ini dan kawan-kawan yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berkeyakinan bahwa dalam penulisan ini masih didapati segala bentuk kekurangan, oleh karena kelemahan penulis sebagai manusia dan keterbatasan referensi yang penulis peroleh, maka untuk itu penulis mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis ini. Semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin

Medan, 23 Oktober 2017

Penulis,

Dhiaul Khali
Nim. 13134008

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
SURAT ISTIMEWA	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Pemberdayaan	8
B. Teori Masyarakat	15
C. Teori Kemiskinan	23
D. Islam Dan Kemiskinan	34
E. Kajian Terdahulu	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Informan Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Tekhnik Pengumpulan Data	43
F. Tekhnik Analisis Data	44

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh (DPMG).....	45
B. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampong Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.....	49
C. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan di Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil	52
D. Hambatan dan keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan di Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil	55

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	61

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinir, agar cita-cita kesejahteraan dapat tercapai lebih dinamis. Namun penangannya selama ini parsial dan tidak berkelanjutan. Kerelawanan sosial dan dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang ada di bangsa ini, buktinya masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan ini harus menjadi perhatian pemerintah dan bagaimana solusinya program dari pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia tersebut.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang, keluarga atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya. Menurut Emil Salim, bahwa kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.¹ Mereka dikatakan

¹ Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: PT. Idayu, 1984), hlm. 60.

dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, biasanya sekaligus tumbuh pula berbagai nilai dan norma sosial yang baru, dan dapat mengakibatkan bergesarnya ukuran-ukuran taraf kehidupan tertentu, yang kemudian menjadi suatu kelaziman bagi masyarakat. Ukuran kaya dan miskin dapat dilihat melalui kemampuan atau jumlah pemilikan nilai-nilai ekonomisnya. Jika pemilikan terhadap nilai-nilai ekonomis ini mengalami ketimpangan, dimana tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah sosial. Lebih-lebih lagi apalagi keadaan tersebut secara umum dirasakan atau melanda sebagian besar jumlah anggota masyarakat. Untuk-untuk negara tertentu umumnya terjadi di daerah-daerah perdesaan, sementara orang-orang kota berebut menguasai sumber ekonomi, seperti status-status, lapangan pekerja tertentu, dan sebagainya.

Faktor ekonomi kemudian dijadikan tolak-ukur dalam menilai tingkat kemiskinan, sebagai bukti faktor ini banyak di perjuangkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahkan faktor ekonomi sering dijadikan kambing hitam dari penyebab timbul masalah sosial, seperti tunakarya, tunasusila, dan tunawisma.

Faktor kemiskinan merupakan masalah yang buruk bagi manusia dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Namun banyak jalan keluar yang dapat di tempuh namun belum efektif sehingga berpengaruh terhadap perilaku

sosial. Dalam program itu, masih ada yang berusaha memeras dan menyumbat. ibarat mencuci diperas sampai kering tanpa harus dijemur, menanam padi tidak sempat makan nasi, demikian perlakuan yang banyak pertumbuhan di abad-abad perubahan suatu masyarakat.²

Kemiskinan sebagai suatu kondisi serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis, berimplikasi jamak kepada kehidupan seseorang atau suatu masyarakat. Sebagai suatu bangsa yang penduduknya kurang lebih dari 90% beragama Islam, tuntutan dan atau kiat Islam dalam mengantisipasi prolematika kemiskinan umat menjadi penting untuk didakwahkan. Sebab, potret kemiskinan umat seperti cenderung diartikan orang merupakan konsekuensi dari kepegangan agama Islam.

Dalam mengurangi kemiskinan tersebut sejatinya harus ada program yang berkelanjutan dalam menangani kasus tersebut, supaya kemiskinan itu terkikis dari kehidupan masyarakat dengan perlahan meskipun kemiskinan itu tidak dapat dihilangkan tapi mencoba untuk dikurangi.

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan sejak lama dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Provinsi Aceh membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan yang ada di

²Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, teori, dan terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 191.

Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Singkil melalui program kerja yang telah dibuat oleh dinas tersebut.

Terlepas dari pemikiran di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong yang memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat, menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti **“Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil”**. Dalam hal ini penulis ingin meneliti Kemiskinan tersebut terkhusus untuk cara menanggulangnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong di Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil ?
2. Apa saja peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan di Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil ?
3. Bagaimana hambatan dan keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan di Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil ?

C. Batasan Istilah

Guna menghindari terjadinya salah paham terhadap istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, maka penulis menggunakan batasan-batasan istilah sebagai berikut :

- Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong : Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat.³ Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong adalah sebuah badan yang bekerja dalam mengelola serta membantu pemberdayaan di masyarakat. Dinas ini juga mempunyai lingkup kerja dalam pengawasan dana desa dan program dalam penyaluran dana tersebut. Pemberdayaan yang sering disebut dengan “*empowerment*”.
- Kemiskinan : Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup.
- Masyarakat : Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh satuan kebudayaan yang mereka anggap sama.⁴

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui jawaban pokok rumusan masalah dan tujuan penelitian secara umum yakni peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong

³Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, 2005), hlm. 854.

⁴*Ibid*, hlm, 400.

dalam mengentaskan masyarakat miskin di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Diantara tujuan penelitian tersebut :

1. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong di Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil ?

2. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan di Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil ?

3. Untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan di Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil ?

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna untuk sebagai bahan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan, dan menambah bagi khazanah ranah wawasan serta pengetahuan yang ilmiah sebagai upaya kontribusi pemikiran dalam meningkatkan pengetahuan kajian disiplin ilmu sosial yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini berguna untuk para pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kabupaten Aceh Singkil dan Indonesia

umumnya sebagai bahan evaluasi tentang perlunya mengentaskan atau mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil. Serta seluruh pihak yang mempunyai kepentingan dalam menjalankan dan melaksanakan tugas untuk mengentaskan masyarakat miskin tersebut.

3. Serta sebagai syarat untuk melengkapi dalam mencapai gelar sarjana sosial (S. Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan mudah memahami kandungan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika pembahasannya berdasarkan bab demi bab serta beberapa sub bab yaitu :

Bab I, pendahuluan yang didalamnya membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan Teori, teori terdiri daripada landasan teori akan dikaji beberapa teori yang dijadikan sebagai acuan teori. Kajian pustaka

Bab III, metode penelitian, meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV, yaitu hasil penelitian pembahasan. Pada hasil penelitian ini akan dibahas tentang, Bentuk Pemberdayaan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan tersebut dan hambatan dan keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan tersebut.

Bab V, penutup merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan yang diistilahkan dengan kata ‘*empowerment*’ adalah sebuah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁵ Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan mau berubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-‘A’rad : 11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا

لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَآلٍ ﴿١١﴾

Artinya Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.⁶

Pemberdayaan artinya memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam

⁵ Eddy Ch. Papilaya, dalam Zubaedi, *Wacana pembangunan alternative*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Madia, 2002), hlm.42.

⁶ Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahan*, (Bandung: Dipenogoro, 2010), hlm. 260.

menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.⁷

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “empowerment” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.⁸ masyarakat yang lemah atau kurang beruntung disadarkan dan diberi rangsangan sehingga kehidupan masyarakat tersebut lebih berdaya.

Pemberdayaan adalah upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.⁹ Ketika masyarakat mampu memilih apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya dan tidak terkenggang oleh keadaan sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan bisa dikatakan sebagai masyarakat yang berdaya.

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. Kedua, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkat taraf

⁷ Eddy Ch. Papilaya, dalam Zubaedi, *Wacana pembangunan alternative*, h. 43.

⁸ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008) h.82.

⁹ Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2001) h.41.

pendidikan, derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dengan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.¹⁰

Dalam memberdayakan suatu masyarakat, konsep pemberdayaan yang dijalankan tentunya berbeda-beda, melihat keadaan suatu masyarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Dalam pengertian konvensional, konsep pemberdayaan sebagai terjemahan empowerment mengandung dua pengertian, yaitu (1) to give power or authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepihak lain (2) to give ability to atau to enable atau usaha untuk memberi

¹⁰ Moh. Ali Azis, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Nusantara, 2005) h. 170.

kemampuan atau keberdayaan. Eksplisit dalam pengertian ke dua ini adalah bagaimana menciptakan peluang mengaktualisasikan keberdayaan seseorang.¹¹

Dasar-dasar pemberdayaan antara lain adalah:¹²

- a. Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat mutual benefit.
- b. Proses pemberdayaan memandang system klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan kesumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
- c. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat memengaruhi.
- d. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat dari pada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
- e. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi.
- f. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur parallel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

¹¹ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputidon, 2007), h. 115.

¹² *Ibid*

Dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh: suatu proses aktif antar motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses system sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sondang P. Siagaan yang dikutip oleh Khoriddin dalam buku *Pembangunan Masyarakat* menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa tujuan (1). Keadilan sosial (2). Kemakmuran merata (3). Perlakuan yang sama di mata hukum (4). Kesejahteraan material, mental, dan spiritual (5). Kebahagiaan untuk sesama (6). Ketenteraman dan keamanan.¹³

Dalam pengertian yang lain pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan ini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas .¹⁴

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

¹³ Khoriddin, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 29

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 59

- c. Ide atau gagasan, yaitu kemampuan mengekspresikan dan mengimbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga. Yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- e. Sumber-sumber yaitu kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktifitas ekonomi, yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi, yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi, dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai “power” dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri. secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:¹⁵

- a. *learning by doing*. Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan kongkrit yang terus menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
- b. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
- c. *Self-evaluation*. Yaitu bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
- d. *Self-development and coordination*. Artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
- e. *Self-selection*. Satu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah kedepan.
- f. *Self-decisim*. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri.

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara kontinyu maka pengaruh yang

¹⁵ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, h.86

ditimbulkan semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan akan terjadi proses menggelinging dengan sendirinya.

B. Teori Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *Society* asal katanya *socius* yang berarti kawan.¹⁶ Dalam bahasa Arab masyarakat adalah Mujtama'.¹⁷ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa masyarakat adalah “Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh satuan kebudayaan yang mereka anggap sama”.¹⁸ Tajul Arifin mengemukakan bahwa masyarakat itu adalah “Sekelompok manusia yang memiliki kebiasaan, ide dan sikap yang sama, hidup di daerah tertentu, menganggapnya sebagai kelompok sosial yang berinteraksi.”¹⁹

Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah “Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa solidaritas bersama”.²⁰ Sedangkan menurut para ahli sosiologi dalam bukunya M. Cholil Mansyur “Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa”,²¹ dijelaskan bahwa masyarakat adalah :

¹⁶ Munandar Sulaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung: PT. Enesco 1993), hlm.63.

¹⁷ Firdaus Al-Hisyam dan Rudy Hariyono, *Kamus lengkap 3 Bahasa Arab-Indonesia-Inggris*.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 610.

¹⁹ Tajul Arifin, *Pengantar Study Sosiologi*, (Bandung: Rosda Karya 1995), hlm.41.

²⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru 1990), hlm.147.

²¹ M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2005), h. 34.

a. Hasan Shadily, masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain.

b. M.M. Djodjodigen, masyarakat adalah mempunyai arti sempit dan arti luas. Arti sempit: Masyarakat adalah yang terdiri dari suatu golongan saja, misalnya masyarakat India, Arab dan Cina. Sedangkan arti luasnya : Masyarakat adalah kebulatan dari semua penghubung yang mungkin dalam masyarakat, jadi meliputi semua golongan. Misalnya masyarakat Surabaya yang terdiri dari masyarakat Hindia, Arab, Cina dan Pelajar.

c. P.J. Bouman, masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, di persatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.

d. A. Lysen, masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan kehidupan individu.²²

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat ialah kumpulan manusia yang bersatu dengan cara tertentu, disebabkan adanya hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama. Adapun yang menjadi syarat-syarat timbulnya masyarakat ialah:

- a. Harus ada sekumpulan manusia yang banyak
- b. Telah bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu yang lama
- c. Adanya aturan-aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama

²²*Ibid*, hlm. 170.

Masyarakat merupakan satu kesatuan manusia yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan. Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi aktualisasi diri dan makhluk yang berbicara atau makhluk yang berfikir. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah masyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok satu sama lainnya saling membutuhkan. Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Sebagai makhluk aktualisasi diri, manusia senantiasa berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya dengan keadaan agar tidak ketinggalan sekaligus sebagai makhluk yang progres yang selalu berubah-ubah dan berkembang untuk mencari tujuan. Sebagai makhluk yang berbicara, manusia adalah makhluk yang berakal yang mempergunakan akal pikiran dalam ucapan dan perbuatan.

Menurut Soejono Soekanto, manusia merupakan makhluk yang mempunyai aneka ragam sebutan, pada prinsipnya adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harta diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang.²³

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Sehingga manusia akan membentuk satu kesatuan yaitu masyarakat.

²³ Soerjoeno Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar, edisi ke-4*, (Jakarta: Grafindo Persada 1990). hlm. 42.

Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai kumpulan individu secara fisik atau pejumlahan manusia secara statistik belaka, melainkan harus dipandang sebagai suatu pergaulan hidup manusia mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum. Manusia merupakan makhluk yang penuh dengan keterbatasan sehingga tak mampu mengisolasi diri secara keseluruhan, maka tak ada pilihan lain mempertahankan kelangsungan hidupnya kecuali harus berhubungan, kerja sama dan mengorganisir kepentingan dengan manusia yang lain dalam satu kelompok masyarakat.

Dengan perkataan lain masyarakat merupakan suatu sistem kemasyarakatan. Selain itu juga masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama.
- b. Bergaul dalam jangka waktu yang relatif lama.
- c. Mengikuti pola tata hubungan yang berlaku umum
- d. Adanya kesadaran diri setiap anggota bahwa masing-masing mereka merupakan bagian dari kelompok atau masyarakatnya.

Menurut Koentjaraningrat, masyarakat merupakan istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat pada dasarnya berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm. 50.

Lebih lanjut Koentjaraningrat menyatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang sering bergaul atau saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui sesuatu yang bisa membuat warga-warganya saling berinteraksi. Suatu negara modern misalnya, merupakan suatu kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi. Artinya masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

2. Tipe-tipe masyarakat

Menurut Nothingham sebagaimana dikutip oleh Kahmad, masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut²⁵:

a. Golongan Petani

Pada umumnya, golongan petani termasuk yang terbelakang. Lokasinya berada di daerah terisolasi, sistem masyarakatnya masih sederhana, lembaga-lembaga sosialnya pun belum banyak berkembang. Disamping alasan-alasan tersebut, unsur-unsur ketidak pastian, ketidak mampuan, kelangkaan, sangat erat dengan kehidupan petani. Mata pancaharian utamanya tergantung pada alam yang tidak bisa dipercepat. Diperlambat, atau diperhitungkan secara cermat sesuai dengan keinginan petani.

b. Golongan Nelayan

²⁵ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosda Karya 2002), hlm.132.

Masyarakat yang memiliki mata pencaharian nelayan bergantung pada keadaan alam, yang mencari ikan di laut, rawa atau sungai. Para nelayan tentunya tergantung dengan keadaan alam. Adanya badai merupakan hal yang tidak diinginkan, karena akan menghambat pekerjaan mereka sebagai nelayan.

c. Golongan Pengrajin

Golongan pengrajin tidak terlalu terikat dengan situasi alam dan tidak terlalu bergantung pada hukum alam. Hidup mereka didasarkan atas landasan ekonomi yang memerlukan perhitungan rasional. Mereka tidak menyadarkan diri pada kemarahan alam yang tidak bisa dipastikan, tetapi lebih mempercayai perencanaan yang diteliti dan pengarahannya yang pasti.

d. Golongan Pedagang Besar

Kategori yang paling menonjol dari golongan pedagang besar adalah memiliki sikap yang lain terhadap agama. Pada umumnya kelompok ini mempunyai jiwa yang jauh dari gagasan tentang imbalan jasa (*compensation*) moral, seperti yang dimiliki golongan tingkat menengah kebawah dan cenderung menutup agama profesi dan etnis.

e. Golongan Karyawan

Golongan karyawan bisa dimasukkan pada masyarakat industri karena sistem sosial yang ada sudah bersifat modern. Hal ini dilihat dari pembagian fungsi-fungsi kerja yang ada sudah jelas dan adanya penyelesaian suatu masalah kemanusiaan berdasarkan penalaran dan efisiensi.

f. Golongan Buruh

Yang dimaksud dengan golongan buruh adalah mereka yang bekerja dalam industri-industri atau perusahaan-perusahaan modern.

Para pakar sosiologi yaitu Muhyiddin dan Syafe'i membuat sejumlah karakter masyarakat desa diantaranya sebagai berikut:

- a. Mayoritas latar belakang komunitas Desa bersama pencaharian pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), baik bertani dengan cocok tanam di ladang atau di sawah.
- b. Karakteristik komunitas Desa relatif sederhana, taat pada tradisi dan agama.
- c. Masih meyakini adanya hal-hal yang tabu dan mistik.
- d. Kehidupan warganya masih bersikap gotong-royong dan masing-masing warganya saling mengenal.
- e. Etos kerja dan pola kehidupan dalam pengaturan waktunya kurang memperhatikan efisiensi.
- f. Ketergantungan pada sumber daya alam masih sangat sesuai dengan hasil pengalamannya sehari-hari.
- g. Tunduk pada orang yang dianggap tokoh atau panutan.
- h. Adanya kontrol sosial yang sangat kuat.

Sedangkan berbicara tentang Tipologi yang ada di masyarakat, ada beberapa Tipologi Partisipasi Masyarakat :

1. Partisipasi spontan (spontaneous participation), yang artinya partisipasi masyarakat terjadi secara sukarela, tanpa didorong oleh pihak luar. Bentuk ini merupakan bentuk

yang ideal dari partisipasi masyarakat. Namun, untuk penjelasan lebih terperinci lagi, jenis partisipasi ini terbagi dalam beberapa dimensi, sebagai berikut :

- a. Partisipasi aktif (*active participation*), dimana dapat terjadi jika masyarakat mencapai tujuan yang ditetapkan sendiri dan mendapatkan kepuasan. Contohnya adalah ketika masyarakat melakukan perannya secara bebas dan memiliki kehendak bebas untuk mengambil keputusan.
 - b. Partisipasi langsung (*direct participation*), dimana adanya interaksi langsung kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dan masyarakat secara langsung dapat menyampaikan aspirasinya.
 - c. Partisipasi tidak resmi (*informal participation*), adanya interaksi yang terjadi di luar status resmi partisipasi antara pemimpin lokal dan pihak pengembangan masyarakat.
 - d. Partisipasi yang asli (*authentic participation*), adanya kesadaran masyarakat untuk menjadi penanggungjawab sepenuhnya atas keputusan yang telah diambil, dimana mengharapkan bagian yang lebih besar dari hasil pengembangan. Biasanya partisipasi ini menunjukkan keterlibatan masyarakat lokal yang mana mereka bukan hanya membutuhkan perubahan dalam bidang politik nasional, tetapi juga menginginkan sebuah perubahan dalam bidang ekonomi.
2. Partisipasi terdorong (*induced participation*), dimana adanya dukungan, perintah dan secara resmi disetujui. Jenis partisipasi ini paling sering ditemui di negara-negara berkembang, dimana pemerintah memiliki peran utama untuk memulai aksi

partisipatif melalui strategi-strategi untuk mendorong dan melatih pemimpin lokal agar mengambil peran memimpin, membangun, kerjasama dan mendukung masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang partisipasi ini, maka akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu :

- a. Partisipasi pasif (*passive participation*), terjadi dimana masyarakat hanya terlibat dalam pelaksanaan dan tidak dilibatkan saat pengambilan keputusan.
 - b. Partisipasi tidak langsung (*indirect participation*), dimana masyarakat tidak mengalami sendiri dan keputusan yang diambil tidak disampaikan langsung, namun melalui perwakilan lembaga atau kelompok tertentu yang ditunjuk secara umum.
 - c. Partisipasi resmi (*formal participation*), dimana sudah terstatus dan disetujui secara resmi, yaitu peraturan dan batasan partisipasinya ditetapkan oleh pemerintah.
 - d. Partisipasi semu (*pseudo participation*), dimana masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi masyarakat terlibat dalam pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh pihak lain.
3. Partisipasi terpaksa (*coercive participation*), merupakan bentuk partisipasi yang paling ekstrim, dimana masyarakat diwajibkan dan dimanipulasi oleh pihak penguasa untuk terlibat dalam pengembangan. Mungkin dalam jangka pendek, ada hasil secara langsung. Namun, dalam jangka panjang, partisipasi ini akan kehilangan dukungan dari masyarakat, tidak menghasilkan bahkan mengikis minat masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas pengembangan.

C. Teori-teori kemiskinan

1. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, [miskin](#) itu berarti tidak berharta benda²⁶. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standard dan tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi

²⁶ *Ibid*, hlm. 150.

kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- 1) Kemiskinan (Proper)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2) Ketidakberdayaan (Powerless)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4) Ketergantungan (dependency)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi

persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5) Keterasingan (Isolation)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Untuk memberi pemahaman konseptual, akan dikemukakan dua pengertian kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan absolut.

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk

kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerahdaerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan kultural.

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu

tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya. Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

- 1) Kemiskinan Alamiah Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.
- 2) Kemiskinan Buatan Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (developmentalism) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target

pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970an dan 1980an.

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan. Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur

4. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum area)
5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan di atas tidak memiliki sifat mutlak (absolut) untuk dijadikan kebenaran universal terutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasi atau diukur.²⁷

2. Indikator-Indikator Mengenai Kemiskinan

Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan menyertakan pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukur banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan pengukuran lainnya adalah

²⁷ *Ibid*, hlm.65.

menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi untuk menerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan. Adapun mengenai 34 beberapa indikator-indikator kemiskinan akan diuraikan pada sub sub bab berikut ini.

3. Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Memperhatikan akar kata "*miskin*" yang disebut di atas sebagai berarti diam atau tidak bergerak diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain.

Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Tuhan, ditujukan kepada makhluk yang dinamainya *dabbah*, yang arti harfiahnya adalah yang bergerak.

Kemiskinan terjadi tentunya pasti ada faktor-faktor penyebabnya. Dibawah ini ada dua Faktor-faktor penyebab manusia, yaitu:

a. Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara manusia:

Adapun Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara manusia, yaitu:

1. Sikap dan pola pikir serta wawasan yang rendah, Malas berpikir dan bekerja,
2. Kurang keterampilan,
3. Pola hidup konsumtif,
4. Sikap apatis/egois/pesimis,
5. Rendah diri,
6. Adanya gep antara kaya dan miskin,
7. Belenggu adat dan kebiasaan,
8. Adanya teknologi baru yang hanya menguntungkan kaum tertentu (kaya),
9. Adanya perusakan lingkungan hidup,
10. Pendidikan rendah,
11. Populasi penduduk yang tinggi,
12. Pemborosan dan kurang menghargai waktu,
13. Kurang motivasi mengembangkan prestasi,
14. Kurang kerjasama,
15. Pengangguran dan sempitnya lapangan kerja,
16. Kesadaran politik dan hukum,
17. Tidak dapat memanfaatkan SDA dan SDM setempat, dan
18. Kurangnya tenaga terampil bertumpun ke kota.²⁸

b. Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara non manusia:

Adapun Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara non manusia:

²⁸ Yuli Hastadewi, *Keluarga*, (Penerbit Yayasan PKPA: Medan, 2000), hlm. 30

- 1) Faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit,
- 2) Keterampilan atau keterisolasi desa,
- 3) Sarana pehubungan tidak ada,
- 4) Kurang Fasilitas umum,
- 5) Langkanya modal,
- 6) Tidak stabilnya harga hasil bumi,
- 7) Industrialisasi sangat minim
- 8) belum terjangkau media informasi,
- 9) Kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa,
- 10) Kepemilikan tanah kurang pemerataan.²⁹

D. Pandangan Islam terhadap kemiskinan

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam memahami kemiskinan, secara normatif, yang berpandangan bahwa ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqih melihat ada tiga faktor yang berkaitan dengan masalah kemiskinan seseorang: Pertama, harta benda yang dimiliki secara sah dan berada ditempat (mal mamruk hadir). Kedua, mata pencaharian (Pekerjaan) tetap, yang dibenarkan oleh hukum (al-kasbal-halal). Ketiga kecukupan (al-kifayah) akan kebutuhan hidup yang pokok. Atas landasan faktor-faktor tersebut dirumuskanlah, bahwa si miskin adalah barang siapa

²⁹ *Ibid*, hlm. 50.

yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, yang hanya menutupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokoknya³⁰.

Oleh karena itu menurut Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa kemiskinan yang terjadi pada manusia sangat membahayakan individu maupun masyarakat dipandang dari berbagai aspek diantaranya adalah³¹ :

a. Kemiskinan dapat membahayakan akidah

Tidak peka lagi, kemiskinan adalah ancaman yang sangat serius terhadap akidah, khususnya bagi kaum miskin yang bermukim di lingkungan kaum berada yang berlaku aniaya.

Bagi orang miskin yang hidup diantara orang-orang kaya, sementara mereka (orang kaya) hanya bersenang-senang tanpa memperdulikan kehidupan disekitarnya. Maka kondisi ini akan menimbulkan keraguan bagi si miskin akan kebijaksanaan Allah SWT mengenai pembagian rizki. Akibat dari kemiskinan dan ketimpangan sosial tersebut bisa timbul penyimpangan akidah.

b. Kemiskinan dapat membahayakan keluarga

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَقْتُلُوا □ □ أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ □ □ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا

³⁰ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan 1994), hlm.171.

³¹DR. Yusuf Qardhawi, *kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.23.

Artinya. “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS.Al Isra’ :31)³²

Ayat tersebut sangat jelas menerangkan bahwa kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. Dari sisi pembentukan keluarga, kemiskinan merupakan salah satu rintangan besar bagi para pemuda untuk melangsungkan perkawinan, disamping terpuhunya sebagai syarat-syarat seperti mahar, nafkah, dan kemnadirian ekonomi. Sebab itulah, Al-Qur’an menasihati mereka yang menghadapi kesulitan itu agar menjaga diri dan bersabar sampai kekuatan ekonominya memungkinkan. Firman Allah SWT:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (QS: An-Nur: 33)³³

Kita juga menyaksikan, sebagian wanita dan para walinya berpaling dari pemuda yang tidak berpunya. Ini adalah penyakit masa lalu yang dikritik oleh Al-Qur’an. Islam menasehati para wali wanita untuk meninjau lagi kriteria mereka dalam memilih calon menantu. Hendaknya mereka tidak hanya mementingkan faktor harta calon menantu dengan mengabaikan faktor agama.

³² Departemen Agama, Al-qur’an dan terjemahannya, hlm. 280

³³ Departemen Agama, Al-qur’an dan terjemahannya, hlm. 230

Kita saksikan, betapa tekanan kemiskinan kadang-kadang menagalahkan nilai-nilai moral. Ia dapat memisahkan seorang suami dengan istrinya. Kondisi seperti ini mendapat perjajian hukum Islam. Menurut hukum Islam, hakim boleh menjatuhkan talak kepada

c. Kemiskinan dapat membahayakan akhlak dan moral.

Selain berbahaya terhadap akidah dan keimanan, kemiskinan juga berbahaya terhadap akhlak dan moral. Kemelaratan dan kesengsaraan seseorang khususnya bila ia hidup diantara golongan orang kaya yang tamak, sering mendorongnya untuk melakukan tindakan pelanggaran sehingga mereka mengabaikan hati nurani serta meragukan nilai-nilai agama.

d. Kemiskinan dapat mengancam kestabilan pemikiran dan masyarakat

Lebih jauh lagi, kemiskinan berbahaya terhadap keamanan dan kestabilan masyarakat. Mungkin saja orang bisa bertoleransi apabila kemiskinan yang terjadi itu disebabkan sumber penghasilan yang sedikit, tetapi lain halnya bila kemiskinan itu disebabkan tidak adanya pemerataan, serakahnya segolongan orang, berfoya-fojanya segolongan kecil masyarakat diatas penderitaan saudaranya. Kemiskinan seperti ini dapat menimbulkan keresahan dan kegoncangan ditengah masyarakat dan dapat menimbulkan kecemburuan sosial serta mengancam kestabilan masyarakat. Untuk menghindari terjadinya beberapa kemungkinan yang ditimbulkan akibat kemiskinan tersebut. Islam memandang sangat perlu bahwa perbedaan antara kaya dan miskin

untuk dihapuskan atau paling tidak dikurangi. beberapa prinsip yang harus ditempuh menurut agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an adalah:

1. Bahwa dalam hidup ini agar saling mengenal dan tolong-menolong.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu bangsa-bangsa, bersuku-suku agar supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu dihadirat Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal.” (QS Al-Hujurat: 13).³⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. Al-maa'idah: 2).³⁵

2. Diwajibkan bagi kaum muslimin untuk memperhatikan dan membantu orang miskin dan orang-orang yang berada dalam kesulitan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-maa'un ayat 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

³⁴ Departemen Agama, Al-qur'an dan terjemahannya, hlm. 514

³⁵ Departemen Agama, Al-qur'an dan terjemahannya, hlm. 106

وَلَا تَخْضُ عَلَي طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Taukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (QS. Al-maa’un:1-3).³⁶

3. Agama Islam mendorong umat agar selalu beramal dan bersedekah

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi orang yang menghendaki-Nya. Dan Allah maha luas (kurnia-Nya) dan maha mengetahui.” (QS. Al-baqarah: 261).³⁷

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

فَهُوَ خَلْفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Apa saja yang kamu belanjakan untuk amal kebaikan, pasti akan diganti oleh Allah, dan dia adalah sebaik-baik yang memberi rizki”. (QS. Saba’:39).³⁸

4. Bahwa setiap muslim diwajibkan membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena .diantara hikmah zakat adalah kepedulian sosial.

³⁶ Departemen Agama, Al-qur’an dan terjemahannya, hlm. 602

³⁷ Departemen Agama, Al-qur’an dan terjemahannya, hlm. 44

³⁸ Departemen Agama, Al-qur’an dan terjemahannya, hlm. 429

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS. At- taubah : 103).³⁹

E. Kajian terdahulu

Pada saat peneliti ingin penelitian ada beberapa peneliti terdahulu memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan saya lakukan, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syukron Munjazi, Skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009. Berjudul: *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm)-Mandiri.*(Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman Kota Yogyakarta).

Kesimpulan tersebut yaitu :

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Pnpm-Mandiri memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan usaha serta tentang konsep dan implementasi program PNPM-Mandiri yang fokusnya pada pemberdayaan masyarakat partisipatoris

³⁹ Departemen Agama, Al-qur’an dan terjemahannya, hlm. 203

dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan yang dilakukan dengan melibatkan secara langsung peranan masyarakat dalam mengawal program, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, terutama di Kelurahan Demangan Kec. Gondokusuman Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berupaya menggambarkan fenomena sosial secara utuh tanpa perlakuan manipulatif. Keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditentukan.

Penelitian ini menekankan pada keaslian data tentang peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (BPMK) dalam melakukan pemberdayaan dan tidak bertentangan dari teori secara deduktif (*apriori*) akan tetapi berangkat dari fakta sebagaimana adanya. Rangkaian fakta yang dikumpulkan, dikelompokkan, ditafsirkan dan disajikan sehingga menghasilkan teori.⁴⁰

Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, maupun organisasi yang dikaji dalam sudut pandang komprehensif.⁴¹

B. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 120

⁴¹ Rosyadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.123

Kegiatan penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong yang bertempat di jalan bahari no 19 Kampong Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Adapun waktu penelitian yang dilakukan awal bulan januari 2017.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pengurus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari Kepala dan Ketua bidang, dan staf-staf tertentu. Penelitian memilih informan yang dianggap mengetahui informasi secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data pokok yang diperoleh dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Bidang Humas.

Kepala Dinas : Drs, Hermanto

Bidang Penataan, Kerjasama, : Amran Ramli, Se. Map

Administrasi Pemerintah Mukim & Kampung

Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Wadri

Bidang Pemberdayaan SDA dan TTG : Ellen Oktaviana Berutu, Se

2. Data sekunder dalam penelitian ini ialah dapat diperoleh dari buku-buku, dan dokumen-dokumen pendukung, program, laporan kerja dan hal lainnya tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung validnya data penelitian.

E. Alat pengumpul data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Maka, teknik yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan antara peneliti dengan pimpinan dan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kabupaten Aceh Singkil. Alat pengambilan data ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang obyektif yang diperlukan peneliti tentang latar belakang obyek penelitian, kondisi riil di lapangan secara umum mengenai program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan menyeluruh terhadap gejala gejala sosial yang terlihat dilapangan.⁴² Dimana penelitian melakukan observasi langsung terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam memberdayakan masyarakat miskin di kabupaten aceh singkil.

3. Dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan terkait dengan permasalahan

⁴² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.138

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong Kabupaten Aceh Singkil mulai dari profil sampai arsip-arsip maupun struktur kegiatan proses kerja selama ini.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan menggunakan alat atau instrumen pengumpulan data, selanjutnya data-data tersebut diolah atau dianalisis. peneliti akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Peneliti akan menelaah kembali data yang telah dikumpulkan (baik melalui wawancara, observasi dan studi dokumen) sehingga ditemukan data sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan pertanyaan atau fokus penelitian.

2. *Display* Data

Peneliti akan melakukan pengelompokan data yang tersaji sedemikian rupa dan tersusun secara sistematis, sehingga data terpola untuk melakukan penarikan kesimpulan.

3. Verifikasi dan Menarik Kesimpulan:

Verifikasi adalah sebuah proses untuk menghasilkan pengumpulan dan pengolahan data melalui triangulasi. Sedangkan penarikan kesimpulan merupakan upaya memaknakan data yang diperoleh dalam penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh (DPMG)

Seirama dengan perkembangan IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan) dalam Pemerintahan Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang, pelaksanaan pembangunan desa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri telah beberapa kali mengalami perubahan baik perkembangan, maupun kebijakan yang menyangkut nama maupun instansi penyelenggaraannya.⁴³

Berdasarkan rangkaian laporan yang disusun oleh rombongan Study Tour dan Expert dari PBB, maka pemerintah mendapatkan gambaran yang jelas tentang maksud dan arti Community Development. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II (24 Maret – 9 April 1957), program pemerintah yang berjangka 5 tahun mulai mencantumkan Program Pembangunan Masyarakat Desa.

Dalam Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 – 6 Maret 1963) organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 1960 jo. Peraturan Presiden

⁴³ <http://dpmg.acehprov.go.id/index.php/page/3/informasi-lembaga> di AksesTanggal 19 Juli 2017 Pukul : 21.35 WIB

Nomor 11 Tahun 1960 yang telah diundangkan pada lembaran Negara tanggal 28 Juli 1960.

Dalam Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964 – 28 Maret 1966) yang terkenal dengan Kabinet 100 Menteri, berdasarkan Keputusan Presiden no. 215 tahun 1964, Pembangunan Masyarakat Desa mendapat tempat terhormat yaitu dengan ditingkatkan kedudukannya, dari Direktorat Jenderal menjadi salah satu Departemen, yaitu Departemen PMD dibawah Kompartemen Pertanian dan Agraria.

Kedudukan PMD dalam Kabinet Ampera berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) yang tetap dibawah naungan Departemen Dalam Negeri, dipimpin oleh H. Aminuddin Aziz dengan sebutan Direktur Jenderal PMD bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) awalnya merupakan institusi dekonsentrasi yang sudah ada semenjak periode orde lama (1950-1965) dan berlanjut pada periode orde baru (1966-1998). Diawal orde baru ini barulah berada di bawah Departemen Dalam Negeri (sebelumnya: di bawah Departemen Pengairan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa).

Pada Kabinet Ampera 25 Juli 1966 - 19 Oktober 1967 di Pusat bernama: Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) Dep. Dalam Negeri, sebutan di Provinsi yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat I. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99 tahun 1972 sebutan di Provinsi

menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi, dan sebutan di Kabupaten/Kotamadya yaitu Sub. Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dan Kepmendagri No.135 Tahun 1978 sebutan di pusat yaitu Direktorat Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes) Dep. Dalam Negeri, sebutan di Provinsi yaitu Direktorat Pembangunan Desa (Ditbangdes) Provinsi, sedangkan sebutan di Kabupaten/Kotamadya yaitu Kantor Pembangunan Desa (Bangdes) Kabupaten/ Kotamadya.

Berdasarkan Keppres No. 27 Tahun 1992 dan Kepmendagri No. 92 tahun 1992 berubah menjadi menjadi di pusat yaitu Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) Dep. Dalam Negeri, di Provinsi : Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Tk.I, dan di Kabupaten/Kotamadya: Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten/Kotamadya Tk.II.

Tahun 1993 berdasarkan Kepmendagri No. 80 tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993 Persetujuan Men PAN No. B.869/I/93 tanggal 23 Agustus 1993 Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Tk. I dan Tk. II diserahkan urusannya menjadi urusan daerah.

Berdasarkan Qanun nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Tk. I berubah namanya menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan PERGUB nomor 117 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh telah berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong berkomitmen ikut serta dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Aceh, namun dalam bahasan kali ini peneliti akan membahas di kabupaten Aceh Singkil. Dalam hal ini telah menjadi visi dan misi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong, yaitu :

Visi : “Terwujudnya keberdayaan masyarakat Aceh serta Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong”

Misi :

1. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
2. Peningkatan keswadayaan masyarakat;
3. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong;

4. Memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan serta program-program prioritas Pemerintah Aceh terutama dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan;

5. Pemantapan nilai – nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan keluarga;

6. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat Gampong;

7. Pemanfaatan sumber daya alam melalui desiminasi informasi sesuai kebutuhan melalui gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

B. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampong Di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

Dalam mewujudkan cita-cita menjadikan masyarakat yang sejahtera berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkannya. Program dan kegiatan dari DPMK menjadi salah satu dalam melakukan pemberdayaan tersebut. Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan DPMK mempunyai program yang prioritas dan rutin, diantaranya⁴⁴:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

⁴⁴ Hermanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong, Wawancara Pribadi, Aceh Singkil : Kamis, 31 Agustus 2017, pukul 09:25 Wib

Sasaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan merupakan program prioritas dari DPMK, adalah terfasilitasinya masyarakat perdesaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang (RPJP) Desa/Kelurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan. Nilai strategis program ini adalah :

- Dalam proses penyusunan melalui mekanisme partisipatif diharapkan keterlibatan aktif para elit desa untuk turutserta menentukan arah pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah desa dalam suatu dokumen.
- Terdapat proses pembelajaran dalam memahami potensi dan pemanfaatan wilayah desa/kelurahan setempat.
- Masyarakat mempunyai “*bargaining position*” yang relatif kuat dalam pengusulan program dan kegiatan dalam berbagai tahapan mekanisme perencanaan.

Dengan langkah ini DPMK Aceh Singkil bisa memberikan masukan kepada pemerintahan desa setempat yang ingin membuat program kerja dengan mengutamakan untuk meningkat potensi yang dimiliki masyarakat tersebut, sebelum program kerja itu disetujui oleh semua perangkat desa yang terlibat.⁴⁵

2. Program Pembinaan Pemerintahan Desa

⁴⁵ Hermanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong, Wawancara Pribadi, Aceh Singkil : Kamis, 31 Agustus 2017, pukul 09:25 Wib

Pemberdayaan masyarakat dibidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja dipemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.

Sasaran Program Pembinaan Pemerintahan Desa adalah berjalannya Pemerintahan Desa meningkatnya kapasitas aparat Desa, khususnya dalam menyongsong otonomi Desa. Nilai strategis dari program, adalah :

- Peningkatan Sistem Pemerintahan Desa dalam kapasitas aparat dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Meningkatnya efektifitas pengelolaan Pemerintahan Desa.
- Terjalannya harmonisasi dan sinergitas antara Desa.⁴⁶

3. Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi merupakan program DPMK untuk meningkat perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDES, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalán, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

⁴⁶ *Ibid*

Sasaran Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan adalah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Unit Usaha Ekonomi Simpan-Pinjam. Nilai strategis dari program ini adalah :

- Terwujudnya aset kolektif yang produktif yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat.
- Secara kumulatif perekonomian wilayah dapat berkembang, dimana masing-masing wilayah mempunyai basis ekonomi yang spesifik dan unik.

4. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Sasaran Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna adalah tersedianya unit-unit Teknologi Tepat Guna (TTG) khususnya dalam mendukung program peningkatan teknostruktur masyarakat dan mendukung program-program strategis daerah, seperti ketersediaan jagung, kopi dan sapi. Nilai strategis dari program ini adalah :

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi produk-produk lokal (teknostruktur komunitas)
- Meningkatnya nilai jual produk usaha-usaha mikro dan kecil dalam pemanfaatan potensi daerah

– Mendukung program peningkatan produksi dan diversifikasi pangan.⁴⁷

C. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam mengentaskan kemiskinan di Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Singkil sebenarnya mempunyai peran yang strategis dalam membantu untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh Singkil. Dinas yang mempunyai bidang dalam pengawasan dana desa, baik dari segi penyaluran maupun pembangunan infrastruktur desa dari dana tersebut.

Peran yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung diantaranya :

1. Dalam bidang penataan, kerjasama, administrasi pemerintah mukim & kampung mereka mempunyai peran dalam memberikan cara pengelolaan dana desa yang baik. Seperti Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang mana desa tersebut bisa menciptakan sarana dan prasarana yang bisa menciptakan atau menumbuhkan potensi yang ada pada masyarakat. Dengan terciptanya potensi yang dimiliki masyarakat tersebut maka bisa menjual untuk meningkatkan ekonomi pada masyarakat.⁴⁸
2. Peran selanjutnya yang dimiliki DPMK Aceh Singkil dalam mengentaskan kemiskinan adalah turun lapangan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman atau pengetahuan untuk menambah wawasan masyarakat tersebut. Seperti masyarakat yang memiliki

⁴⁷ Ellen Oktaviana Berutu, Se, Ketua Bidang Pemberdayaan SDA dan TTTG, Wawancara Pribadi, Aceh Singkil : Jum'at, 1 September 2017, pukul 10:00 Wib

⁴⁸ Amran Ramli, "Kepala Bidang penataan, kerjasama, adm pemerintahan mukim dan kampung", Wawancara Pribadi, Aceh Singkil : Kamis 31 Agustus 2017, pukul 11:00 Wib

- pekerjaan sebagai petani, bagaimana masyarakat tersebut menciptakan Hydrant (Pompa Air) yang bisa menjadikan sawah mereka lebih hijau.⁴⁹
3. Memberikan saran kepada pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin, menyempurkan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta pembangunan dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
 4. Dalam bidang pemberdayaan SDA dan TTG juga bisa memberikan peran memberikan kepada masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dengan cara melakukan pembinaan untuk menciptakan inovasi. Yang mana setiap tahunnya ada perlombaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk membangun potensi yang ada pada masyarakat tersebut.
 5. Pemanfaat Sumber Daya Alam yang ada di desa tersebut, seperti pembuatan kerambah bagi desa yang di pinggir sungai atau di pinggir laut, kemudian kerambah itu diolah sebaik mungkin untuk dijadikan penghasilan guna menunjang ekonomi masyarakat tersebut.
 6. Pemberdayaan masyarakat melalui pnpm mandiri perdesaan untuk meningkatnya pembangunan di pedesaan dengan tersedianya sarana dan prasarana publik.

⁴⁹ Ellen Oktaviana Berutu, Se, Ketua Bidang Pemberdayaan SDA dan TTG, Wawancara Pribadi, Aceh Singkil : Jum'at, 1 September 2017, pukul 10:30 Wib

D. Hambatan dan keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan di Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong memiliki tolak ukur dalam melihat hambatan dan keberhasilan untuk melakukan pemberdayaan dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh Singkil. Adapun hambatan yang ditemukan adalah⁵⁰ :

1. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman serta komitmen yang sungguh-sungguh yang dimiliki masyarakat. Karena pada umumnya ketika masyarakat diberikan pelatihan hanya beberapa hari atau minggu saja semangat mereka untuk melakukannya.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program pemberdayaan didesa, hanya sebagian masyarakat saja yang benar-benar mau mendalami program yang akan dilakukan.
3. Kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki DPMK untuk melakukan pemberdayaan ke desa-desa yang ada di kecamatan Singkil.⁵¹
4. Adanya kendala umum masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan yaitu motivasi kurang, faktor usia, faktor pekerjaan, serta kurangnya sosialisasi yang diberikan pengelola.

⁵⁰ Hermanto, Kepala Dinas PMK , Wawancara Pribadi, Aceh Singkil : Kamis, 31 Agustus 2017, pukul 10:25 Wib

⁵¹ *Ibid*

5. Kendala yang lain adalah pengelola dalam melaksanakan yaitu kendala dalam pemodalannya dan kendala dalam fasilitas.
6. Kurangnya minat yang besar sebagian masyarakat untuk merubah hidup mereka.

Kendala yang di atas ini merupakan hasil penelitian yang di ungkapkan oleh salah seorang pegawai DPMK yang sering turun lapangan untuk melakukan program pemberdayaan.

Adapun keberhasilan dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong adalah :

1. Bertambahnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola dan melakukan penataan terhadap desa mereka sendiri.
2. Mendapatkan data yang real dari kehidupan masyarakat yang bisa dilaporkan kepada pemerintahan Kabupaten untuk mengetahui mana yang benar-benar harus bantu dan dari segi mana yang harus dibenahi di desa tersebut.⁵²
3. Mendapatkan potensi Sumber Daya Alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan penghasilan guna untuk menunjang ekonomi kehidupan.
4. Untuk dapat maju dalam melakukan sesuatu, orang harus dibangunkan dari tidurnya. Demikian juga masyarakat yang harus dibangunkan dari “tidur” ketertinggalannya, dari kehidupan sehari-hari yang tidak memikirkan masa

⁵² Ellen Oktaviana Berutu, Se, Ketua Bidang Pemberdayaan SDA dan TTG, Wawancara Pribadi, Aceh Singkil : Jum'at, 1 September 2017, pukul 10:30 Wib

depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan.

Dalam hal ini mempunyai keberhasilan yaitu menyadarkan masyarakat bahwa hidup ini tidak hanya begini saja dan harus mempunyai tujuan dalam menjalani hidup.

5. Menemukan potensi yang ada di masyarakat, sehingga dengan potensi tersebut masyarakat itu sendiri bisa memanfaatkannya. Seperti pembuata hydrant pompa air yang mana untuk haydrant yang biasa hanya mempunyai satu pompa kemudian dengan menggali lebih lanjut masyarakat tersebut bisa membuatnya dengan dua pompa sehingga mempercepat laju air untuk sawah yang tidak takut akan kekeringan.

E. Analisi Penulis

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong mempunyai peluang dan peran yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi melalui program pemberdayaan terhadap desa-desa, sesuai dengan salah satu dari misi Dinas tersebut yaitu menunjang perekonomian masyarakat.

DPMK juga telah menjalankan program kerjanya yang telah berhasil menemukan dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat meskipun hanya sebagian kecil saja. Pemberdayaan itu harus dilakukan secara *continue* agar

programnya tidak berhenti di tengah jalan. Sebetulnya telah banyak program dalam mengurangi kemiskinan ini, hanya karena tidak dijalankan secara sungguh-sungguh sehingga program tersebut berhenti ditengah jalan adanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendapatkan data penelitian lapangan serta suvey secara langsung kemudian membahas dan menganalisisnya, maka penulis dapat membuat kesimpulan atas hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manusia umumnya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam diri masing-masing yang telah diberikan Allah SWT. akan tetapi kebanyakan manusia tidak bisa memanfaatkan kelebihan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menemukan berbagai bentuk upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil supaya kemiskinan itu dapat berkurang meskipun tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat mendapatkan kehidupan yang sejahtera.

Bentuk pemberdayaan tersebut berupa memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dilingkungan sekitar, dengan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

2. Ada beberapa peran yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil yaitu dalam pemerintahan desa, pegawai DPMK berhak memberikan arahan dan sosialisasi dalam pengelolaan desa. Seperti pengelolaan

dana desa agar tersalurkan dengan baik yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Pegawai DPMK juga bisa memberikan masukan kepada pemerintahan desa agar dalam menggunakan dana desa tersebut tidak memfokuskan bangunan fisik, yang mana masih banyak harus dibenahi lagi dalam setiap desa. Misalnya meningkatkan kreatifitas dan inovasi yang ada dimasyarakat dengan melakukan pemberdayaan kerajinan tangan yang bisa dipasarkan kepada konsumen. Dengan melakukan kerajinan tangan tersebut masyarakat memperoleh untung dari hasil penjualan yang dikerjakannya.

3. Dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat tentunya ada hambatan yang kita temui dilapangan yang mana hambatan itu berupa pengetahuan atau pemahaman yang kurang dimasyarakat sehingga menyulitkan kita dalam melakukan pemberdayaan. Kemudian hambatan yang berupa permusuhan individu yang ada dimasyarakat tersebut sehingga menyulitkan kekompakan dalam melakukan agenda-agenda pemberdayaan. Ini merupakan masalah internal yang dimiliki setiap desa karena tidak seluruhnya anggota masyarakat itu hidup rukun dan damai akan tetapi selalu yang memiliki permasalahan pribadi. Hal inilah yang menjadi hambatan pegawai DPMK dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut.

B. Saran- saran

Setelah mengadakan penelitian tentang peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada DPMK hendaknya lebih aktif dalam menjalankan perannya sebagai Dinas yang menaungi masyarakat dengan lebih aktif dalam memberikan sosialisasi berupa pengetahuan kepada masyarakat Kecamatan Singki agar masyarakat tersebut lebih kompeten dalam menjalani kehidupannya.
2. Kepada Kepala Desa lebih baik lagi dalam memimpin desanya supaya masyarakat merasa desa tersebut diperhatikan dan memang ada niat untuk memajukan desa tersebut. Lebih berhati-hati dalam melakukan penyaluran dana desa supaya masyarakat merasa memiliki dan tersebut tersebut meskipun itu tidak berupa uang.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil hendaknya lebih sering untuk turun ke lapangan atau ke desa-desa agar tau kehidupan masyarakat yang bapak pimpin. Jangan lebih sering dikantor saja tanpa memikirkan kehidupan yang ada dimasyarakat.
4. Penyelenggaraan pemberdayaan seharusnya berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilakukan dengan cara musyawarah dengan masyarakat, sehingga kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat akan terpenuhi dan terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Arifin, Tajul, *Pengantar Study Sosiologi*, Bandung: Rosda Karya, 1995
- Ali Azis Moh, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Nusantara, 2005
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2008
- Departemen Agama, *Al-Qur-an dan terjemahannya*, Bandung
- Eddy Ch. Papilaya, dalam Zubaedi, *Wacana pembangunan alternative*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Madia, 2002
- Hastadewi, Yuli, *Keluarga*, Penerbit Yayasan PKPA: Medan, 2000
- Huraerah Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2008
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: Rosda Karya, 2002
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1990
- Khoriddin, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1992
- K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994
- Mansyur Cholil M, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 2005
- Mardimin, Yohanes, *Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, Penerbit Kanisius: Yogyakarta, 1996
- Mahendrawaty Nanih dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam* Bandung: Rosdakarya, 2001

- Munandar Sulaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: PT. Enesco, 1993
- Ruslan, Rosyadi, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Salim, Emil, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Jakarta: PT. Idayu, 1984
- Syani, Abdul, *Sosiologi Skematika, teori, dan terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- Soekanto, Soerjoeno, *Sosiologi Suatu Pengantar, edisi ke-4*, Jakarta: Grafindo Persada 1990
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, 2005
- Qardhawi Yusuf, *kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Wrihatnolo Randy R dan Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputidon, 2007
- <http://dpmg.acehprov.go.id/index.php/page/3/informasi-lembaga> di Akses Tanggal 19 Juli 2017 Pukul : 21.35 WIB

Daftar riwayat Hidup

A. Identitas

Nama : Dhaiul Khali
Nim : 13134008
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi/ Pengembangan Masyarakat Islam
Tempat, Tgl Lahir : Singkil, 12 Desember 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Agama
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Seroja Komplek Citra Blok A No. 07, Medan Sunggal, Medan
Nama Orang Tua
Ayah : Ilyas Zein (Alm)
Ibu : Siti Ralijah S. Pd. I
Anak Ke : 2 dari 4 Bersaudara

B. Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 3 Singkil Tahun 2007
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Singkil Tahun 2010
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Singkil Tahun 2013
4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2017

C. Latar Belakang Organisasi

1. Ketua Bidang Pramuka OSIM MAN Singkil Tahun 2011-2013
2. Ketua Bidang Research And Development SAPO LPYD 2017
3. Ketua Bidang HUMAS dan Syiar Islam Lembaga Dakwah Fakultas Al-Izzah UIN SU tahun 2016
4. CEO di La Tahzan Community

Motto Hidup

**“jangan menyerah dengan keterbatasan yang kamu punya,
lakukan yang terbaik dengan itu”**

